

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar ekonomi Islam mulai dilakukan. Perbankan syariah pada era reformasi ditandai dengan disetujuinya Undang-Undang No.10 Tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah.¹

Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan sistem perbankan syariah dengan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu ragu lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kacamata agama. Bahwa yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan, akan tetapi karena dalam operasionalnya terdapat unsur-unsur yang

¹ Antonio Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hlm 25-26.

dilarang berupa perjudian, unsur ketidakpastian atau keraguan, unsur bunga dan unsur kebathilan.²

Banyak dan bervariasinya kebutuhan masyarakat serta kemajuan zaman membuat bank syariah harus mengikuti kebutuhan masyarakat, bersaing dalam memberikan pinjaman yang mudah dari bank lain, lebih baik dalam memberikan pelayanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan hal yang mudah dalam transaksi keuangan salah satunya adalah menggunakan *syariah card*. Dimana dengan menggunakan kartu ini seseorang tidak perlu membawa uang dalam jumlah besar dan kemungkinan memiliki resiko kehilangan yang cukup besar.

CIMB Niaga Syariah adalah Unit Usaha Syariah (UUS) PT Bank CIMB Niaga Tbk untuk merespon perkembangan bisnis perbankan syariah Indonesia dan permintaan masyarakat terhadap layanan perbankan universal yang inovatif, lebih aman dan menguntungkan. Untuk mendukung layanan berkualitas, CIMB Niaga Syariah memadukan keunggulan teknologi dan keragaman produk dengan kualitas layanan tinggi (*excellent service quality*). Transaksi perbankan yang ditawarkan CIMB Niaga Syariah bersifat universal, aman, nyaman, tentram, serta adil bagi seluruh pihak.³

Di dalam Bank CIMB Niaga itu sendiri terdapat beberapa produk yaitu, pendanaan (tabungan, deposito, giro), pembiayaan (simulasi pembiayaan, pembiayaan iB Kepemilikan Rumah, pembiayaan iB Kepemilikan Mobil,

² Anshori Abdul Ghofur, *Hukum Perbankan Syariah (UU No.21 Tahun 2008)*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2009), Hlm 1.

³ <https://www.cimbniaga.com/in/personal/news-and-promotions/news/cimb-niaga-syariah-andalkan-produk-unggulan-di-2017.html>. 27-02-2018, 11.15.

Pembiayaan Gadai iB Xtra Emas), bancassurance (asuransi jiwa), dan ada juga CIMB Niaga Syariah Gold Card.⁴

Adapun ketentuan tentang Syariah Card yang diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 54/DSN-MUI/XI/2006 tentang *Syariah Card* bahwa:

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*), dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembelanjaan.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Dalam syarat dan ketentuan umum CIMB Niaga Syariah Card terdapat keterangan bahwa pemegang kartu berjanji dengan sungguh-sungguh menggunakan kartu untuk bertransaksi dan belanja produk-produk, jasa-jasa dan kegiatan-kegiatan yang halal dan bermanfaat (*halalan thoyyiban*) serta tidak dilarang oleh syariah. Pemegang kartu berjanji dengan sungguh-sungguh tidak menggunakan kartu untuk transaksi belanja yang dilarang oleh syariah seperti, namun tidak terbatas kepada pornografi, pornoaksi, tindakan dan perbuatan asusila, kekerasan, kejahatan, barang-barang yang haram secara zat (seperti daging babi, bangkai, darah) dan membahayakan kesehatan (seperti rokok, minuman keras (*khamar*), zat adiktif), dan lain sebagainya. Untuk mengurangi penyalahgunaan

⁴ <https://www.cimbniaga.com/in/about-us/index.html>. 27-02-2018, 11.05.

kartu, bank tidak menganjurkan transaksi pada *Merchant* dengan spesifikasi sebagai berikut:

- a. Merchant khusus penjual minuman keras (khamar);
- b. Tempat hiburan orang dewasa (antara lain night club, bar, diskotik, dan lainnya yang sejenis);
- c. Tempat perjudian.

Apabila pemegang kartu bertransaksi melanggar prinsip syariah, maka Bank dapat menghentikan hak-hak sebagai Pemegang Kartu, namun Pemegang Kartu tetap berkewajiban membayar seluruh hutang/kewajiban sebagaimana diatur di dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

Kartu kredit ini mengacu kepada Undang-undang Perbankan, Undang-undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008 dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang *Syariah Card* bahwa dalam perjanjiannya tidak menggunakan sistem bunga karena tidak sesuai dengan prinsip Syariah melainkan dengan menggunakan akad yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Ketentuan yang diatur dalam fatwa ini terdapat 3 akad yaitu *kafalah*, *qardh*, *ijarah*. *Kafalah* dalam hal ini penerbit kartu adalah penjamin (*kafil*) bagi pemegang kartu terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar (*dayn*) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu dengan Merchant, atau penarikan tunai. *Qardh* adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui

⁵ Sholihin Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm 273.

penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Dan *Ijarah* adalah penyedia jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu. Atas *Ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan membership *Fee*.⁶

Kartu kredit syariah ini merupakan alat pembayaran yang mengarah ke non-tunai seperti yang ditangkap oleh beberapa bank syariah yang salah satunya dilakukan dengan memberikan produk kredit syariah kepada nasabah. Dengan menggunakan kartu kredit atau kartu pembiayaan, transaksi pembayaran bisa dengan mudah dan cepat dilakukan. Tanpa harus membawa uang di tangan, segala macam transaksi tetap bisa dituntaskan. Dan ketika nasabah menggunakan kartu kredit syariah yang telat membayar tidak dikenakan bunga, melainkan dikenakan denda (*ta'widh*) biaya penagihan bank dan denda sebesar persentase tertentu dari tagihan. Denda tersebut tidak menjadi hak bank, melainkan akan disumbangkan ke lembaga amal.⁷

Sedangkan untuk ketentuan mengenai denda, bank diperbolehkan mengenakan denda keterlambatan yang nantinya dana tersebut diakui sebagai dana sosial. *Ta'widh* merupakan biaya ganti rugi yang disebabkan oleh kelalaian dalam membayar yang menyebabkan kerugian pada bank syariah, dimana dana tersebut menjadi pemasukan bank. Pemberian ganti rugi (*ta'widh*) hanya terbatas pada kerugian yang riil saja dan tidak boleh dinyatakan di awal akad ini sesuai dengan

⁶ Sholihin Ahmad Ifham, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), Hlm 279.

⁷ Hidayat Taufik, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Mediakita, 2011), Hlm 155-158.

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ricky Dwi Patria selaku Relationship Manager Funding di CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Bandung, Gold Card merupakan salah satu produk yang mengaplikasikan 3 akad yaitu *Kafalah*, *Ijarah*, dan *Qardh*. Dan terdapat pula ketentuan mengenai penggunaan dan biaya yang timbul dari Syariah Gold Card ini, dimana pemegang kartu dapat melakukan penarikan uang tunai diseluruh kantor cabang Bank CIMB Niaga atau ATM atau Bank lain yang berlogo MasterCard batas penarikan tunai ditetapkan oleh bank, sedangkan untuk pembayaran bisa dilakukan lewat M-Banking, Internet Banking, atau Teller.

Dalam Produk ini terdapat beberapa jenis biaya yang diaplikasikan di CIMB Niaga Syari'ah yaitu sebagai berikut:

Tabel 1

Jenis Biaya Pada CIMB Niaga Syari'ah Gold Card

Annual Fee	Free For Life
Basic Supplement	Rp 150.000
Cash Advance Fee	Rp 50.000
Batas Cash Advance Limit Per Day	20% Rp 2.000.000
Late Charges	Rp 0
Ta'widh*	Rp 135.000
Card Replacement Fee	Rp 75.000
Copy of Billing Statement Fee	Rp 25.000
Copy Sales Draft Fee	Rp 40.000
Increase Limit Fee (permanen/sementara)	Free

Payment Fee	
ATM CIMB Niaga	Free
E-Payment CIMB Niaga	Free
Counter Bank CIMB Niaga	Sesuai
ATM Bersama/Prima	Ketentuan
E-channel BCA, Mandiri & BNI	Rp 6.500
E-channel Permata & ATM	Rp 9.000
Danamon	Rp 7.500

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ricky Dwi Patria selaku Relationship Manager Funding di CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Bandung, Gold Card ini merupakan produk pembiayaan atau peminjaman menggunakan alat yang berupa kartu, dimana di dalam kartu tersebut terdapat limit mulai dari Rp 3.000.000,- sampai Rp 100.000.000,- dengan MFC mulai dari Rp 307.705,- sampai Rp 4.600.000,-. Cukup banyak nasabah yang mempunyai kartu kredit dari bank konvensional, ini dikarenakan sangat mudah dan praktis dalam penggunaannya, itu menjadi salah satu alasan untuk bank syariah mengeluarkan kartu kredit berbasis syariah mengingat bahwa kartu kredit konvensional itu menggunakan bunga yang dimana itu tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam ketentuan jenis biaya pada tabel di atas bahwa *ta'widh* di kenakan kepada nasabah pemilik kartu sejumlah Rp 135.000,- perbulan, merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh bank dan menjadi kewajiban nasabah pengguna gold card di bank tersebut. Sedangkan dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad, namun pada pelaksanaannya di Bank CIMB Niaga Syariah menggunakan *ta'widh* tersebut di awal akad dan besarnya ganti rugi sudah ditentukan di awal akad oleh bank.

B. Rumusan Masalah

Cukup banyak nasabah yang menggunakan kartu kredit karena penggunaanya yang mudah dan praktis hal tersebut menjadi alasan bank syariah mengeluarkan kartu kredit berbasis syariah. Akan tetapi, kartu kredit berbasis syariah ini menetapkan biaya *ta'widh* yang besarnya sudah ditentukan oleh bank.

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan ke dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan *Ta'widh* pada produk Gold Card di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung?
2. Apa alasan hukum penerapan *ta'widh* di awal akad di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung?
3. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penerapan *ta'widh* pada produk pembiayaan gold card di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan *Ta'widh* pada produk Gold Card di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung.
2. Untuk mengetahui apa alasan hukum penerapan *ta'widh* di awal akad di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai penerapan *ta'widh* pada produk pembiayaan gold card di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini di harapkan akan bermanfaat bagi ilmu ekonomi islam, khususnya bagi bidang hukum ekonomi syariah serta menambah bahan-bahan informasi yang dapat digunakan untuk melaksanakan kajian dan penelitian selanjutnya.

2. Kegunaan Praktis

- a. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini dan diharapkan akan berguna bagi pihak-pihak yang berminat terhadap masalah pada produk kartu kredit syariah/Gold Card.
- b. Memberikan masukan dan saran pada lembaga yang bersangkutan dalam rangka mengembangkan dan meningkatkan perusahaan dalam meningkatkan ekonomi umat.

E. Studi Terdahulu

Nama & Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
Siti Marini Fatimah (2013):	Pemberlakuan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) menjadi tidak jelas, karena pihak bank seolah-olah tidak konsisten	Sama-sama membahas tentang ganti rugi (<i>ta'widh</i>)	Bedanya terdapat dalam akad,

<p>Aplikasi <i>Ta'widh</i> pada Pembiayaan Murabahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang.</p>	<p>terhadap akad yang dibuat, sehingga bisa mengakibatkan adanya unsur gharar ataupun Riba. Pelaksanaan besarnya ganti rugi (<i>ta'widh</i>) ini yang dicantumkan dalam akad, dimana dalam Fatwa No.43 Tahun 2004 tentang ganti rugi (<i>ta'widh</i>) ada ketentuan khusus bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad. Namun pada pelaksanaannya pihak bank mencantumkan besarnya ganti rugi yang diakibatkan oleh nasabah yang menunggak.</p>	<p>yang dicantumkan di awal akad.</p>	<p>menggunakan 3 akad.</p>
<p>Rokoyatus Safriyah (2013):</p>	<p>Pelaksanaan denda yang dilakukan merupakan salah satu kebijakan perusahaan melalui proses panjang</p>	<p>Sama-sama membahas tentang ganti rugi.</p>	<p>Penelitian penulis jenisnya berbeda,</p>

<p>Pelaksanaan Denda pada Produk Tabungan iB X-TRA Syariah KCS Bandung.</p>	<p>dalam mempertahankan kualitas produk serta mendisiplinkan nasabah.</p> <p>Dari tinjauan fiqh muamalah akad yang digunakan dalam tabungan ini adalah akad <i>wadiah yad-dhamanah</i> yakni titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki dan kemungkinan lembaga keuangan syariah untuk memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan kepadanya dengan pelaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam.</p> <p>Namun, untuk kebijakan</p>		<p>karena berbeda akadnya.</p>
---	--	--	--------------------------------

	perusahaan yang telah ditetapkan, terutama dalam penerapan denda harus dikaji ulang agar tidak merusak asas-asas dalam bermuamalah.		
Nadya Wuri Handayani (2013): Tinjauan Fatwa DSN No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (<i>Ta'widh</i>) pada Produk KPR Indensya BTN iB melalui Akad Istishna' di Bank Tabungan Negara Syariah	Dan penentuan ganti rugi (<i>ta'widh</i>) dalam produk KPR Indensya di BTN KCS Bandung kurang sesuai dengan fatwa DSN No.43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (<i>ta'widh</i>) dalam ketentuan khusus point 3: karena adanya penentuan ganti rugi ini dicantumkan terlebih dahulu di dalam akad karena itu termasuk dalam kategori gharar (ketidakpastian) karena <i>ta'widh</i> merupakan sebagai bentuk proses	Sama-sama membahas tentang ganti rugi (<i>Ta'widh</i>)	Bedanya penulis membahas tentang gold card atau kartu kredit.

<p>Cabang Bandung</p>	<p>ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan.</p> <p>Implementasi fatwa DSN terhadap pembiayaan KPR</p> <p>Indensya BTN iB melalui akad istishna' (pesanan) adalah ganti rugi yang diterima dalam transaksi LKS dapat diakui sebagai hak pendapatan bagi pihak yang menerimanya, jumlah ganti rugi besarnya harus tetap dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak, besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.</p>		
---------------------------	--	--	--

Untuk mendukung penelitian yang lebih akurat sebagaimana yang telah dikemukakan pada latar belakang masalah, maka diperlukan karya-karya pendukung yang memiliki relevansi terhadap tema yang dikaji dan untuk memastikan tidak adanya kesamaan dengan penelitian-penelitian yang telah ada, maka di bawah ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian penulis.

Oleh Siti Marini Fatimah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul, “Aplikasi *Ta'widh* pada Pembiayaan Murabahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang”, dari skripsi tersebut menyimpulkan bahwa jumlah angsuran lebih ringan sedangkan jumlah angsuran tahun kedua sampai tahun ke sepuluh jumlahnya lebih berat dan flat. Apabila merujuk kembali pada akad pembiayaan murabahah, jumlah ganti rugi (*ta'widh*) yang harusnya dibayarkan itu sesuai dengan nilai angsuran yang telah diberikan oleh pihak bank. Namun pada pelaksanaan pemberlakuan ganti rugi (*ta'widh*) itu sendiri, besaran jumlah ganti rugi (*ta'widh*) ditentukan berdasarkan jumlah angsuran yang lebih berat. Dengan hal tersebut, pemberlakuan ganti rugi (*ta'widh*) menjadi tidak jelas, karena pihak bank seolah-olah tidak konsisten terhadap akad yang dibuat, sehingga bisa mengakibatkan adanya unsur gharar ataupun riba. Disamping itu, apabila dilihat kembali pada akad pembiayaan murabahah di Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang, pada pelaksanaan besarnya ganti rugi (*ta'widh*) ini yang dicantumkan dalam akad, dimana dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No.43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi

(*ta'widh*) ada ketentuan khusus bahwa besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad. Namun pada pelaksanaannya, pihak Bank Jabar Banten Syariah KCP Sumedang mencantumkan besarnya ganti rugi yang diakibatkan oleh nasabah yang menunggak pembayaran.

Oleh Rokoyatus Safriyah, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul, “Pelaksanaan Denda pada Produk Tabungan iB X-TRA Syariah KCS Bandung”, dari skripsi tersebut menyimpulkan bahwa pelaksanaan denda pada Tabungan iB X-TRA Syariah di Bank CIMB Niaga Syariah kantor Cabang Syariah Bandung sama seperti pelaksanaan produk funding di unit usaha syariah lainnya, yang menjadi pembeda adalah akadnya yang menggunakan akad *wadiah yad-dhamanah*. Pelaksanaan denda yang dilakukan merupakan salah satu kebijakan perusahaan melalui proses panjang dalam mempertahankan kualitas produk serta mendisiplinkan nasabah. Dari tinjauan fiqh muamalah akad yang digunakan dalam tabungan ini adalah akad *wadiah yad-dhamanah* yakni titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki dan kemungkinan lembaga keuangan syariah untuk memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan kepadanya dengan pelaksanaan yang sesuai dengan syariat Islam. Namun, untuk kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan, terutama dalam penerapan denda harus dikaji ulang agar tidak merusak asas-asas dalam bermuamalah.

Oleh Nadya Wuri Handayani, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul, “Tinjauan Fatwa DSN

No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) pada Produk KPR Indensya BTN iB melalui Akad Istishna' di Bank Tabungan Negara Syariah Cabang Bandung”, dari skripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam mekanisme pembiayaan KPR Indensya BTN iB melalui akad istishna' (pesanan) adalah pembiayaan yang menyangkut 3 pihak namun yang terjadi dilapangan sudah sesuai dengan apa yang telah ditentukan di dalam fatwa DSN MUI mengenai ketentuan pembayaran, ketentuan barang, dan ketentuan mengenai hukum pembiayaan istishna'. Dan penentuan ganti rugi (*ta'widh*) dalam produk KPR Indensya di BTN KCS Bandung kurang sesuai dengan fatwa DSN No.43/DSNMUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*) dalam ketentuan khusus point 3: karena adanya penentuan ganti rugi ini dicantumkan terlebih dahulu di dalam akad karena itu termasuk dalam kategori gharar (ketidakpastian) karena *ta'widh* merupakan sebagai bentuk proses ganti rugi yang telah dikeluarkan oleh salah satu pihak yang merasa kerugian atas biaya yang telah dikeluarkan. Implementasi fatwa DSN terhadap pembiayaan KPR Indensya BTN iB melalui akad istishna' (pesanan) adalah ganti rugi yang diterima dalam transaksi LKS dapat diakui sebagai hak pendapatan bagi pihak yang menerimanya, jumlah ganti rugi besarnya harus tetap dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak, besarnya ganti rugi tidak boleh dicantumkan dalam akad.

F. Kerangka Pemikiran

Penggunaan akad dalam pembiayaan gold card terdapat 3 akad yaitu *Qardh*, *Ijarah*, dan *Kafalah* yang mana masing-masing memiliki peran tertentu dalam penggunaan gold card di bank.

Pengertian *Qardh* menurut Wahbah al-Zuhayli, ialah kepemilikan sesuatu pada yang lain, dalam penggantinya tidak ada tambahan.⁸ *Qardh* merupakan pinjaman kebijakan atau lunak tanpa imbalan, biasanya untuk pembelian barang-barang *fungible* (yaitu barang yang dapat diperkirakan dan diganti sesuai berat, ukuran, dan jumlahnya).⁹

Menurut Mazhab Maliki pengertian *Kafalah* ialah orang yang mempunyai hak mengerjakan tanggungan pemberi beban serta bebannya sendiri yang disatukan, baik menanggung pekerjaan yang sesuai (sama) maupun pekerjaan yang berbeda.¹⁰ Pengertian *Kafalah* adalah jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makful*).¹¹

Menurut MA. Tihami, *al-Ijarah* (sewa-menyewa) ialah akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan (mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu legal untuk diambil manfaatnya, dengan memberikan pembayaran (sewa) tertentu.¹² *Ijarah* adalah sewa-menyewa dalam menukarkan sesuatu dengan adanya imbalan atau biasa disebut upah-mengupah.¹³

⁸ Yadi Janwari, *Fikih Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), Hlm 265.

⁹ Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), Hlm 46.

¹⁰ Sohari Sahrani ; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), Hlm 245.

¹¹ Ascarya, *Akad & produk bank syariah*,, Hlm 105.

¹² MA. Tihami, *Kamus istilah-istilah dalam Studi Keislaman menurut Syaikh Muhammad Nawawi al-Bantani*, (Serang: Suhud Sentra Utama, 2003), Hlm 35.

¹³ Sohari Sahrani ; Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*,, Hlm 168.

Ta'widh berarti ganti rugi yang berupa denda yang diberikan pihak bank kepada nasabah, karena nasabah tersebut melakukan pelanggaran dengan sengaja terhadap ketentuan akad dan menimbulkan kerugian bagi pihak bank.¹⁴ Ganti rugi (*Ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

Al-Qur'an surat Al-Ma'idah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي
ٱلصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (١)

Artinya:

”Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.”

An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِٱلْإِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 2007), Hlm 94.

membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

Hadits Nabi riwayat Nasa’i dari Syuraidd bin Suwaid, Abu Dawud dari Syuraidd bin Suwaid, Ibu Majah dari Syuraidd bin Suwaid, dan Ahmad dari Syuraidd bin Suwaid:

لِيُؤَاجِدُجُلَّ عِرْضَهُ وَ عَقُوبَتَهُ.

“Menunda-nunda (pembayaran) yang dilakukan oleh orang mampu menghalalkan harga diri dan pemberian sanksi kepadanya.”

Kaidah Fiqh

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Ketentuan umum yang berlaku pada ganti rugi (*Ta'widh*) itu terjadi karena keuntungan dan kerugian yang belum pasti di masa yang akan datang, maka ketentuan huku fiqh tersebut tidak dapat diganti. Hal itu karena objek ganti rugi (*Ta'widh*) adalah harta yang ada dan konkret serta berharga.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 bahwa *Ta'widh* (ganti rugi) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dapat dikenakan

ta'widh sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.¹⁵

Berdasarkan fatwa DSN-MUI mengenai kartu kredit syariah, terdapat ketentuan akad yang digunakan dalam kartu kredit syariah, yaitu *kafalah*, *ijarah*, dan *qardh*. Akad yang pertama adalah akad *kafalah*. Akad *kafalah* dalam hal ini penerbit kartu adalah kafil bagi pemegang kartu terhadap *merchant* atas semua kewajiban bayar.

Akad yang kedua adalah *ijarah*. Akad *ijarah* dalam hal ini adalah penerbit kartu yang menyediakan jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu atas sistem pembayaran terhadap pemegang kartu. Atas *ijarah* ini, pemegang kartu dikenakan *membership fee*.

Akad yang ketiga adalah *qardh*. Akad *qardh* dalam hal ini penerbit kartu adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu. Dalam *qardh* tidak disyaratkan suatu manfaat atau kelebihan tertentu terhadap yang berhutang.¹⁶

Syariah Card menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 54/DSN-MUI/X/2006 adalah kartu yang berfungsi seperti Kartu Kredit yang hubungan hukum (berdasarkan sistem yang sudah ada) antara para pihak berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa ini.

¹⁵ Fatwa DSN MUI No 43 tahun 2004 tentang Ta'widh.

¹⁶ Nurul Hikmah, *Pelaksanaan Ganti Rugi (Ta'widh) Dalam Produk iB Hasanah Card Dihubungkan dengan Fatwa DSN MUI No. 3/DSN MUI/VIII/2004 Di BNI Syariah Kantor Cabang Buah Batu Bandung*, (Skripsi S1 Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung), Hlm 12-13.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan metode untuk mengidentifikasi dan menggambarkan suatu penelitian secara sistematis, melukiskan suatu keadaan subjek atau objek penelitian seseorang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.¹⁷ Adapun alasan menggunakan metode ini yaitu dianggap mampu menggali, mengungkap fakta, dan fenomena empirik yang terjadi di lapangan pada akad *Qardh*, *Ijarah*, dan *Kafalah*.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bank CIMB Niaga syariah Bandung, yaitu di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang di jalan Lembong No.7 Bandung.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data kualitatif, karena peneliti memaparkan dan menggambarkan secara rinci apa yang terjadi di lapangan mengenai penerapan *ta'widh* pada produk pembiayaan Gold Card di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Bandung Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Jenis data tersebut berupa:

¹⁷ Nawawi Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005), Hlm 63.

- a. Data tentang akad *Ijarah*, *Qardh*, dan *Kafalah* di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Bandung.
- b. Data tentang latar belakang penerapan *Ta'widh* di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Bandung.
- c. Data tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah di Bank CIMB Niaga Syariah Kantor Cabang Bandung.

4. Sumber Data

- a. Data Primer
Bapak Ricky Bagian Relationship Manager Funding Bank Cimb Niaga Syariah Kantor Cabang Bandung.
- b. Data sekunder
Dalam penelitian ini yaitu seperti Referensi Buku, Jurnal atau Makalah, Internet, Artikel, Catatan perkuliahan dan lain sebagainya menyangkut dengan penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi
Observasi, teknik ini melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian yang dituju agar dapat melihat langsung proses penerapan *Ta'widh* dengan menggunakan akad *Ijarah*, *Qardh*, dan *Kafalah*. Penulis melakukan penelitian di Bank CIMB Niaga Syariah KC Bandung pada bulan Februari 2018.
- b. Wawancara

Wawancara merupakan proses mengumpulkan data melalui pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksikan makna dalam suatu data tersebut. Wawancara ini di lakukan dengan staf dari pihak Bank CIMB Niaga Syariah, yaitu Bapak Ricky bagian *Relationship Manager Funding*. Yang beralamat di Jalan Lembong No.7 Bandung CIMB Niaga Syariah KC Bandung.

c. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah penelitian dengan mempelajari sejumlah literatur yang berhubungan dengan penerapan *ta'widh* menggunakan akad *Ijarah*, *Qardh*, dan *Kafalah* agar memperoleh data secara teoritik.

6. Analisis Data

Analisis ini dilakukan sejak awal sampai dengan akhir penelitian yang dilakukan di lapangan, yaitu:

- a. Dengan memahami seluruh data yang telah ada.
- b. Mengaplikasikan data yang telah ada sebagai data primer dan sekunder.
- c. Menghubungkan data yang telah ada seperti data wawancara, observasi, dan teori yang sesuai dengan kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
- d. Menganalisis data menggunakan metode kualitatif sehingga akan menghasilkan sebuah kesimpulan.